

CAPACITY BUILDING CAMAT DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN KEPALA DESA DI KECAMATAN KERINCI KANAN KABUPATEN SIAK

Tri Hariana, Zainal

*Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Islam Riau, Jl. Kaharuddin Nasution No. 13 Perhentian Marpoyan
Pekanbaru, Indonesia 90221*

Email:

ABSTRACT

The problem of this research is the lack of capacity building in the subdistrict head in conducting the training of village heads so that there are still some village heads who lack understanding in carrying out their duties. The purpose of this study was to determine how the quality of the Camat's Capacity Building in Guiding Village Heads in the Kerinci Kanan District of Siak Regency. This study used qualitative research methods. The indicators in this study are human resources, organization and institutional reform. The use of qualitative methods aims to support the level of results so that they can be justified and easily understood. This research data collection instrument prioritizes interviews as a means of obtaining the main raw materials to obtain suitable results. The key informants of this study were the Kerinci Kanan Sub-District Chief, Kerinci Kanan Village Head, Kerinci Kiri Village Head, Bukit Agung Village Head, and one of the communities from each village. Based on the results of the discussion it can be concluded that capacity building is not a process that starts from zero but starts from building existing potentials and then is processed in order to further improve the quality of self, groups, organizations, and systems in order to survive amid an environment that experiences continuous change by utilizing cooperation between sub-district apparatus with village apparatus.

Keywords: Capacity Building, Coaching

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Pemerintah pada umumnya menggerakkan pelayanan umum, pengaturan dan

perlindungan masyarakat serta pembangunan dan pengembangan. Sedangkan tugas dan kewajiban pemerintah untuk membuat regulasi tentang pelayanan umum, pengembangan sumber daya produktif, melindungi ketentraman dan persatuan nasional, pengembangan kehidupan demokrasi, pencapaian keadilan dan pemerataan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, mendukung pembangunan nasional dan pengembangan

kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat berdasarkan Pancasila serta menjaga tegak, lestari dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 pasal 10 pada poin (g) yaitu Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa. Pembinaan yang dilakukan Camat sebagai perpanjangan tangan dari Bupati dalam mengefektifkan jalannya roda pemerintahan pada tingkat desa.

Pemerintah kecamatan merupakan wujud nyata dari suatu organisasi formal yang berfungsi menjalankan fungsi pemerintahan secara umum dalam melayani masyarakat. Pemerintah kecamatan dapat dikatakan sebagai penyelenggara birokrasi pemerintahan yang berada setingkat sebih tinggi dari Kelurahan/Desa.

Namun, tugas tersebut tidak dengan serta merta memposisikan Camat sebagai kepala wilayah seperti pada waktu lalu. Dalam hal penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Camat mempunyai peranan yang sangat penting, karena dalam hirarki pemerintahan kecamatan merupakan salah satu lembaga supra desa, yang mana salah satu tugasnya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa/kelurahan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan.

Dalam upaya memberdayakan kecamatan dan dalam rangka percepatan otonomi daerah, maka dengan persetujuan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, maka dijelaskan tugas Camat dalam upaya pembinaan dan perbaikan pemerintahan desa sebagai berikut

- ;
- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa.
 - b. Memberikan bimbingan supervise, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan.
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/ atau lurah. Camat juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.
 - d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/ atau kelurahan.
 - e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan Di tingkat kecamatan.
 - f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati/Walikota.

Hal yang terpenting dari fungsi *Capacity Building* seorang Camat dalam membina dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang dilakukan oleh setiap aparat pemerintah dengan masyarakat, sehingga yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat dijalankan dengan baik oleh masyarakat. Sehingga demikian terciptanya suatu masyarakat yang beradab, dimana menunjang setiap program dan kegiatan demi terciptanya suatu pembangunan yang adil dan merata.

Capacity Building yang dilakukan oleh Camat dalam melakukan pembinaan terhadap Kepala Desa tercakup dalam konsep pembinaan, dimana Camat sebagai pimpinan tertinggi di kecamatan dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan Bupati/Walikota untuk

dilaksanakan dalam wilayah kerja Kecamatan. Upaya yang dilakukan Camat dalam rangka memperlancar pelaksanaan pembinaan Kepala Desa di Kecamatan Kerinci Kanan, yaitu meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Kepala Desa. Diharapkan pembinaan yang dilakukan dapat mengurangi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Kepala Desa, maka akan berakibat baik terhadap kelancaran pelaksanaan pemerintah Desa dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas masih banyak masalah yang penulis teliti di Kecamatan Kerinci Kanan antara lain sebagai berikut :

1. Camat hanya sebatas menyampaikan tata cara penyusunan Perdas dan Perkades secara tertulis dan pada pertemuan seluruh Kepala Desa jarang ada bimbingan teknis. Disini terlihat masih ada kepala desa yang melakukan kesalahan dalam melakukan tugasnya seperti kurang pemahaman dalam setiap melakukan tugas karena tidak ada praktik dan bimbingan langsung mengenai tugas khususnya di 3 (tiga) desa yang penulis teliti.
2. implementasi dari masing-masing desa mengenai perencanaan pembangunan secara partisipatif belum berjalan sepenuhnya. Dimana desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan hanya melibatkan LPM, Ketua RW, Kepala Dusun, dan anggota BPD tanpa ada melibatkan masyarakat sepenuhnya yakni pemuda, karang taruna, tokoh agama, tokoh pendidikan.
3. Fasilitas Administrasi pemerintahan desa merupakan salah satu unsur terpenting yang harus dipenuhi setiap desa dalam menyelenggarakan roda pemerintahan

desa. Namun terlihat banyak desa di Kecamatan Kerinci Kanan belum mampu memenuhi administrasi pemerintahan desa, dimana ketidjelasan administrasi desa ini terdapat pada jumlah aparat yang ada di desa hanya 2-5 orang yang mengakibatkan hasil kerja penyelenggaraan pemerintahan desa belum optimal.

4. Bahwa beberapa Kepala Desa yang ada di Kecamatan Kerinci Kanan, diduga bahwa camat Kerinci Kanan belum melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peranturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 pasal 10 pada poin (g) yaitu Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa, hal ini terlihat dari 3 Desa yaitu Desa Kerinci Kanan, Desa Kerinci Kiri dan Desa Bukit Agung yang ada di Kecamatan Kerinci Kanan belum menyelenggarakan pemerintahan secara maksimal
5. Masih terdapat bentuk kesalahan yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam menjalankan tugas Pemerintahan Desa dalam Pembuatan Peraturan Desa serta unsur pendukung lainnya seperti infrastruktur Desa.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah penulis uraikan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "*Capacity Building* Camat Dalam Melakukan Pembinaan Kepala Desa di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak".

STUDI KEPUSTAKAAN **Konsep Ilmu Pemerintahan**

Menurut Maulidiah (2014:1-2)

pemerintahan secara umum ialah orang atau sekelompok orang yang diberikan legitimasi oleh masyarakat untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah, dan dilengkapi oleh alat-alat kelengkapan negara yang bertugas dalam membantu pemerintah untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah. Sehingga unsur utama pemerintah tersebut yakni orang atau sekelompok orang, yang diberikan legitimasi dalam bentuk kewenangan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintah yang dalam ini adalah menyelenggarakan pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan, pelayanan kemasyarakatan dan pemberdayaan sehingga pemerintah dalam ini memiliki fungsi dasar yakni pelayanan.

Menurut Ndraha (2011 : 7) menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil, dalam hubungan pemerintah (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Sedangkan menurut Brasz (dalam Syafie 2007:35) berpendapat ilmu pemerintahan dapat di artikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga/dinas pemerintahan umum itu di susun dan di fungsikan, baik secara internal maupun keluar terhadap para warganya.

Di dalam ilmu pemerintahan, yang dimaksud dengan pemerintahan ini berkaitan dengan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan, jadi pemerintahan kecamatan merupakan wujud nyata dari suatu organisasi formal yang berfungsi menjalankan fungsi pemerintah secara umum dalam melayani masyarakat. Pemerintah kecamatan dapat dikatakan sebagai penyelenggara birokrasi

pemerintahan yang berada setingkat lebih tinggi dari pemerintahan Kelurahan/Desa.

Pemerintahan

Pemerintahan adalah segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran, melarang dari buruk itulah orang yang beruntung. Pemerintahan dalam pengertian yang sempit ialah *segala aktivitas, tugas, fungsi, dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga yang berwenang serta mengelola dan mengatur jalannya sistem pemerintahan negara untuk mencapai tujuan negara.*

Sedangkan dalam arti yang luas, pemerintahan merupakan sebuah bentuk organisasi yang tugasnya menjalankan suatu sistem pemerintahan dan segala bentuk aktivitas yang terorganisasi & terstruktur dengan baik berlandaskan pada dasar negara, rakyat dan wilayah negaranya dalam mencapai tujuan sebuah negara. Adapun struktur pemerintah terdiri dari *badan eksekutif, legislatif dan yudikatif.*

Menurut syafiie (2011; 5) Pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang setelah ditambah awalan “pe” menjadi kata “pemerintah” dan ketika mendapat akhiran “an” menjadi kata “pemerintahan”, dalam hal ini beda antara “pemerintah” dengan “pemerintahan” adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan sedangkan pemerintahan berarti hal ikhwal pemerintahan itu sendiri (Syafiie, 2011;5).

Sedangkan Subakti (1992; 168) Menyatakan istilah pemerintah dan pemerintahan berbeda artinya, yaitu pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangan, sedangkan pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan negara.

Menurut Van Poelje (dalam hamdi,

1999; 52) menjelaskan bahwa pemerintahan dapat dipandang sebagai suatu ilmu yaitu yang mengajarkan bagaimana cara terbaik dalam mengarahkan dan memimpin pelayanan umum. Masyarakat tak akan dapat berdiri sendiri memenuhi kebutuhan tanpa adanya pemerintah yang memberikan pelayanan. Ini merupakan fungsi yang bersifat umum dan dilakukan oleh seluruh negara di dunia.

Konsep Capacity Building

Capacity building yang menyatakan bahwa pengembangan sumber daya manusia sebagai serangkaian aktivitas yang sistematis dan terencana yang dirancang oleh organisasi untuk memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk mempelajari keahlian yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan kerja saat ini dan yang akan datang. (Werner dan De Simone, 2009:4 Daharti 2013:10) UNDP Daharti (2013:11) selanjutnya mendefinisikan peningkatan kapasitas yaitu proses jangka panjang yang terus menerus melibatkan semua *stake holders*, termasuk kementerian pemerintahan, pemerintah daerah, organisasi non pemerintah, profesional, anggota masyarakat, akademisi, dan lebih membangun kapasitas menggunakan manusia suatu negara, kemampuan ilmiah, teknologi, organisasi kelembagaan dan sumber daya. Tujuan dari peningkatan kapasitas adalah untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan kebijakan dan metode pembangunan, membatasi potensi dan kebutuhan orang-orang dari negara yang bersangkutan.

Menurut (Daniel Ricket dalam Hardjanto, 2006:67) menyebutkan "*the ultimate goal of capacity building is to enable the organization to grow stronger in achieving its purpose and mission*". Lebih

jauh dirumuskan bahwa tujuan dari pengembangan kapasitas adalah :

1. Mengakselestarikan pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pemantauan secara proporsional, tugas, fungsi, sistem keuangan, mekanisme dan tanggung jawab dalam rangka pelaksanaan peningkatan kapasitas daerah.
3. Mobilisasi sumber-sumber dana Pemerintah, Daerah dan lainnya
4. Penggunaan sumber-sumber dana secara efektif dan efisiensi.

Penjelasan Grindle sudah cukup jelas bahwa dalam pengembangan kapasitas memiliki dimensi, fokus dan tipe kegiatan. Dimensi, fokus dan tipe tersebut yaitu :

1. Dimensi pengembangan SDM, dengan fokus personil yang profesional dan kemampuan teknis serta tipe kegiatan seperti traning, praktek langsung, kondisi iklim dan rekrutmen.
2. Dimensi penguatan organisasi, dengan fokus tata manajemen untuk meningkatkan keberhasilan peran dan fungsi serta kegiatan seperti sistem insentif, perlengkapan personil, kepemimpinan, budaya organisasi, komunikasi, struktur manajerial.
3. Reformasi kelembagaan, dengan fokus kelembagaan dan sistem serta makro struktur, dengan tipe kegiatan, aturan main ekonomi dan politik, perubahan kebijakan dan regulasi dan reformasi konstitusi.

Konsep Pembinaan

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang

dilakukan secara berdaya guna dan berhasil dengan baik.

Selanjutnya Thoha (2008;7) Pembinaan sebagai suatu tindakan, proses hasil atau pernyataan menjadi lebih baik, dalam hal ini menunjukkan adanya keanjuran dan peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas suatu hal. Ada dua unsur pengertian pembinaan yakni pembinaan itu sendiri berupa tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan dan yang kedua adalah bahwa dalam pembinaan itu biasanya menunjukkan pada “perbaikan” atas sesuatu. Menurut Wijaksono (2006;223) mengatakan pembinaan dapat diartikan sebagai upaya membawa memelihara suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan semestinya.

Konsep Camat

Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota, Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara pemerintah di wilayah kecamatan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten kota. Camat diangkat oleh bupati atau walikota kabupaten.

Menurut Bayu Suryaningrat (2006:2) camat adalah seseorang yang mengepalai dan membina suatu wilayah yang biasanya terdiri dari beberapa desa atau kelurahan. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang pedoman organisasi kecamatan menyebutkan bahwa camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota sesuai karakteristik wilayah kebutuhan daerah dan Tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota bukan sebagai kepala wilayah.pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan daerah (Nurcholis, 2005 : 133).

METODE PENELITIAN

Bagian ini berisi desain penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan metode analisis data. Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang diambil dan sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif melalui pendekatan metode penelitian kualitatif. Menurut Isaac dan Michael (Rakhmat, 2005: 22) metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat. Berdasarkan pemahaman metode penelitian deskriptif dari para ahli maka penelitian mengenai *Capacity Building* Camat Dalam Melakukan Pembinaan Di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak tepat menggunakan metode penelitian deskriptif. Selain menggunakan metode deskriptif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2000: 3) metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan penelitian yang memahami informasi tentang objek

penelitian. Informan yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan. Tokoh formal yang menjadi subjek atau informan dalam penelitian ini yaitu Camat, Kepala Desa Kerinci Kanan, Kepala Desa Kerinci Kiri dan Kepala Desa Bukit Agung. Sedangkan tokoh informal yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu 3 (tiga) orang perwakilan dari desa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi.

Pada indikator sumber daya manusia ini dapat dijelaskan mengenai tanggapan tentang *Capacity Building* Camat Dalam Melakukan Pembinaan Kepala Desa Di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. Berdasarkan hasil wawancara peneliti mengenai indikator sumber daya peneliti menganalisis bahwa kendala dari proses pekerjaan kepala desa adalah fasilitas yang kurang memadai sehingga kurangnya pemahaman atas perkembangan ilmu pengetahuan. Seharusnya perlengkapan fasilitas administrasi desa memadai sehingga tidak terjadi keraguan dalam melakukan tugasnya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat peneliti menganalisis bahwa Kecamatan harus melakukan survei dan melihat secara

keseluruhan tentang fasilitas yang ada di desa sehingga dalam melakukan pelayanan masyarakat bisa merasa nyaman dan aparat desa juga tidak di desak dengan alasan fasilitas yang kurang memadai.

Berdasarkan wawancara dengan camat kerinci kanan, beliau menegaskan bahwa pembinaan yang diberikan kepada kepala desa maupun perangkat desa sudah dilakukan untuk membantu dan memberikan pengarahan kepada perangkat maupun kepala desa dalam menjalankan administrasi desa dan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa, namun kendala yang dihadapi dalam hal ini adalah tidak mencukupinya fasilitas yang tersedia yang dapat menunjang jalannya administrasi desa dan juga minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia sehingga jalannya proses administrasi yang ada di desa mengalami hambatan.

Organisasi

Organisasi adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk melakukan kerjasama secara rasional serta sistematis yang dipimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya.

Pada indikator organisasi ini akan dijelaskan mengenai tanggapan informan mengenai *Capacity Building* Camat Dalam Melakukan Pembinaan Kepala Desa Di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti mengenai indikator organisasi dapat analisis dengan adanya pelatihan yang dilakukan oleh aparat kecamatan maka perintah yang diberikan oleh atasan dapat dijalankan sesuai yang diinginkan dan dalam

melakukan pelayanan kepada masyarakat memberikan peningkatan agar masyarakat yang dilayani merasa puas akan pelayanan yang diberikan aparat desa serta dengan adanya bimbingan dan pelatihan yang dilakukan oleh aparat kecamatan sangat membantu namun sangat disayangkan jika masih ada salah satu desa yang masih kurang paham dengan pelatihan sehingga membuat sistem pelayanan administrasi desa kurang memuaskan bagi masyarakat. Untuk langkah yang perlu dilakukan oleh semua pihak baik yang memberikan pelayanan (aparatur desa) ataupun yang menerima pelayanan (masyarakat) hendaknya saling bekerjasama dengan baik, yakni bagi aparatur desa dengan meningkatkan kualitas layanan baik dari aspek prosedur yang perlu disederhanakan, kejelasan unit kerja dan transparansi biaya pelayanan, kemudian bekenaan dengan waktu layanan dengan cara menyelesaikan layanan tepat waktu.

Berdasarkan ungkapan di atas masalah lain yang menjadi kendala adalah tingkat kemampuan atau kompetensi yang dimiliki desa masih terbatas sehingga membuat pelayanan administrasi desa menjadi terhambat dan masyarakat kurang puas dengan pelayanan yang diterima dari pemerintah desa. Pembinaan yang dilakukan juga dianggap telah membantu perangkat desa dalam melakukan pelayanan administrasi hanya saja terbatasnya sumber daya manusia yang ada di desa dari segi pengetahuan dan kompetensinya sehingga pelayanan dan pembinaan yang dilakukan kurang optimal, sehingga camat kerinci kanan sering turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi pemerintah desa.

Reformasi Kelembagaan

Reformasi kelembagaan pada intinya

menunjukkan pada pengembangan iklim dan budaya yang kondusif bagi penyelenggara program kapasitas personal dan kelembagaan menuju pada realisasi tujuan yang ingin dicapai. Reformasi kelembagaan menunjukkan dua aspek penting yaitu struktural dan kultural. Kedua aspek ini harus dikelola sedemikian rupa dan menjadi aspek yang penting dan kondusif dalam menompang program pengembangan kapasitas karena pengembangan kapasitas harus diawali pada identifikasi kapasitas yang dimiliki maka harus ada pengakuan dari personal dan lembaga tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki dari kapasitas yang tersedia. Pengakuan ini penting karena kejujuran tentang kemampuan yang dimiliki merupakan setengah syarat yang harus dimiliki dalam rangka menyukseskan program pengembangan kapasitas.

Pada indikator Reformasi Kelembagaan ini dapat dijelaskan mengenai tanggapan tentang *Capacity Building* Camat Dalam Melakukan Pembinaan Kepala Desa Di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti mengenai reformasi kelembagaan dapat di analisis agar interaksi berjalan sesuai dengan yang diharapkan maka harus rutin melakukan pengawasan agar pekerjaan pemerintahan desa bisa dilihat secara langsung dan jika ada kendala bisa langsung berinteraksi dan segera diatasi dan dengan adanya kerjasama ini tujuan yang hendak dicapai organisasi yang sudah digariskan dalam bentuk keputusan bersama akan terwujud, karena pada dasarnya organisasi pemerintahan kecamatan merupakan satu sistem dimana antara bagian yang satu dengan bagian yang lain merupakan satu

keutuhan yang tidak terpisahkan serta dengan adanya interaksi secara langsung mereka lebih mudah menilai kemampuan seorang atasan dalam memimpin bawahannya, jika aparat kecamatan bisa sering melakukan interaksi dengan aparat desa maupun masyarakat akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di setiap daerah bahkan desa.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa Camat sudah melakukan koordinasi dengan perangkat-perangkat Desa untuk membantu menyelesaikan tugas dan tanggung jawab baik dari tugas dan tanggung jawab Camat itu sendiri maupun dari tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh Desa. Hal ini dilakukan untuk menyelesaikan langsung masalah ataupun kendala yang ada dengan melakukan pengawasan. Karena pengawasan yang dilakukan untuk memantau pekerjaan Kepala Desa serta aparat Desa di setiap Desa dan memeriksa kelengkapan administrasi desa yang sudah menjadi bagian dari wilayah pekerjaan seorang Camat.

Dari hasil pengamatan atau observasi yang dilakukan peneliti, peneliti melihat pembinaan yang diberikan oleh Camat kepada Desa sudah cukup optimal hanya saja kurangnya perlengkapan yang menunjang jalannya pelayanan administrasi yang ada di Desa, seperti peneliti melihat masih kurangnya kursi yang ada di loket pelayanan sehingga masyarakat banyak yang mengantri dengan berdiri karena tidak mencukupinya fasilitas kursi yang disediakan yang membuat masyarakat yang kurang nyaman apabila mengurus surat yang dibutuhkan dan harus menunggu lama. Selain itu kendala yang lain yaitu masih adanya perangkat desa atau sumber daya manusianya yang belum sepenuhnya

mengetahui dan melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, sedangkan Camat sendiri telah melakukan pembinaan dan pelatihan kepada perangkat desa sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain itu Camat kerinci kanan sendiri juga telah melakukan kerjasama atau koordinasi dengan baik terhadap pemerintah desa maupun perangkat Desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang baik. Dengan adanya interaksi secara langsung mereka lebih mudah menilai kemampuan seorang atasan dalam memimpin bawahannya, jika aparat kecamatan bisa sering melakukan interaksi dengan aparat Desa maupun masyarakat akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di setiap daerah bahkan Desa.

Hambatan dalam Capacity Building Camat Dalam Melakukan Pembinaan Kepala Desa Di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak adalah sebagai berikut :

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di lapangan melalui observasi dan wawancara, maka dapat disimpulkan faktor yang menjadi penghambat terhadap *Capacity Building* Camat Dalam Melakukan Pembinaan Kepala Desa Di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak dapat dilihat sebagai berikut;

1. Rendahnya kualitas SDM (sumber daya manusia) perangkat desa yang menjadi penghambat dalam peningkatan *capacity building* Camat di kerinci kanan. Hal ini disebabkan masih banyak yang kurang paham dalam mengoperasikan fasilitas yang ada di kantor.

2. Keterbatasan sarana prasarana yang ada di desa mengakibatkan pelayanan administrasi dalam melayani masyarakat mengalami kendala dan membutuhkan waktu lama dalam proses pelayanan. Penyelenggaraan peraturan yang tidak kondusif yang menghambat pengembangan *capacity building*, kebijakan pemimpin/camat dalam menyediakan fasilitas, ruang dan waktu ini sangat dibutuhkan untuk mengembangkan kemampuan personal maupun organisasi.
3. Kurangnya sarana prasarana yang sangat menghambat sistem kerja dari pembinaan yang dilakukan oleh camat sehingga *capacity building* seorang camat belum optimal. Disini butuh partisipasi dari aparatur kecamatan dan aparatur desa serta masyarakat untuk saling melengkapi kekurangan yang ada.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, yang telah dilakukan bahwa *Capacity Building* Camat Dalam Melakukan Pembinaan Kepala Desa Di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak yaitu Camat telah melakukan pembinaan yang berupa pemberian bimbingan kepada aparatur desa. Dalam pemberian bimbingannya menunjukkan bahwa Camat sebagai aparatur pemerintah Kecamatan telah melaksanakan tugasnya dengan baik, akan tetapi yang menjadi faktor penghambatnya adalah rendahnya sumber daya dari aparatur desa sehingga menjadi kendala dalam proses peningkatan *capacity building* seorang camat. Kemudian Camat telah memberikan pelatihan kepada aparatur pemerintah desa. Dalam pemberian

pelatihannya bahwa pemerintah Kecamatan sudah baik dalam melaksanakan tugasnya, akan tetapi sarana dan prasarana dalam proses pelatihan masih kurang memadai sehingga dalam proses pelatihan yang dilakukan oleh camat tidak maksimal dan selanjutnya Sebagai Aparatur Pemerintah Kecamatan, Camat juga telah melakukan pengawasan kepada aparatur desa. Pengawasan yang dilakukan oleh camat dengan cara turun ke lapangan, berinteraksi secara langsung kepada aparatur desa serta masyarakat, hal ini membuktikan bahwa camat telah melakukan tugasnya. Dengan demikian bahwa *capacity building* bukan proses yang berangkat dari nol melainkan berawal dari membangun potensi yang sudah ada kemudian diproses agar lebih meningkatkan kualitas diri, kelompok, organisasi, serta sistem agar tetap bertahan ditengah lingkungan yang mengalami perubahan terus menerus dengan memanfaatkan kerjasama antara aparatur kecamatan dengan aparatur desa.

Dengan demikian bahwa *capacity building* bukan proses yang berangkat dari nol melainkan berawal dari membangun potensi yang sudah ada kemudian diproses agar lebih meningkatkan kualitas diri, kelompok, organisasi, serta sistem agar tetap bertahan ditengah lingkungan yang mengalami perubahan terus menerus dengan memanfaatkan kerjasama antara aparatur kecamatan dengan aparatur desa.

REFERENSI

- Anni Milen, 2004. *Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas*. Yogyakarta: Diterjemahkan Secara Bebas Pondok Pustaka Yogya.
- Bungin, Burhan. 2001. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.

- Haryanto. 2014. *Pengembangan Kapasitas Kelembagaan*. AP2I Nasional.
- Lexy J. Moleong. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Talizuduhu. 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Rasyid, Ryaas, 2002. *Makna Pemerintahan*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Riyadi Soeprapto, MS. 2010. *The Capacity Building For Local Government Toward Good Governance, Word bank*.
- Santoso, Pandji. 2005. *Administrasi Publik – Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Revika Aditama.
- Santoso, 2005. *Pembinaan Dalam Organisasi*. Jakarta: Gramedia.
- Sugiyono. 2015. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syafie, Inu Kencana. 2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT. Rineka Aditama.
- Syafie, Inu Kencana. 2009. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Thoha, Miftah. 2008. *Birokrasi Pemerintahan Indonesia di Era Reformasi*. Jakarta: Kencana Perdana Media Grup.
- Thoha, Miftah. 2010. *Pembinaan organisasi, Proses dianosa dan Intervensi, Manajemen kepemimpinan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Usman, Husaini. 2009/ *Metododlogi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wasistiono, Sadu. 2003. *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Bandung: Fokus Media.
- Wijaksono, Kristian Widya. 2006. *Administrasi dan Birokrasi Pemerintahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Winkel, 2002. *Dampak Pembangunan dan Pendidikan Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Daerah*, Yogyakarta: Depdikbud.
- Zulkifli, ddk. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian (UP), Skripsi dan Kertas Kerja*. Pekanbaru: Badan Penerbit Fisipol UIR.